

**DAFTAR RISIKO KECURANGAN ATAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	TAHAPAN PROSES	NAMA RISIKO	SKENARIO RISIKO	PIHAK TERKAIT	JENIS RISIKO KECURANGAN	PEMILIK RISIKO	URAIAN PENYEBAB	INDIKATOR/ GEJALA/ RED FLAG	PENGENDALIAN TERPASANG	NILAI RISIKO			RESPON TERHADAP RISIKO
										KEMUNGKINAN	DAMPAK	STATUS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A PERENCANAAN PENGANGGARAN</b>													
1	Perencanaan Penganggaran	Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa	PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan dibawah 200 juta yang bertujuan menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung	1. PPTK 2. PPK 3. KPA/PA	Korupsi (Conflict Of Interest)	PA/PPK	kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang	Nilai paket pengadaan pekerjaan mendekati 200juta	Reviu RKA oleh TAPD dan Irda Desk Sirup untuk pemaketan pekerjaan/konsolidasi paket antara BPBJ dan OPD	2	5	21	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan
<b>B PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN</b>													
2	Pelaksanaan kegiatan	Pengeluaran kegiatan Fiktif	Belanja barang dan jasa dipertanggungjawabkan tidak sesuai realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan	PPTK KPA/PA pihak Penyedia	Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) yang bersifat Kas - fictitious expenses	PA/KPA	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	1. Nilai SPJ sama dengan anggarannya hingga titik koma 2. Dokumen SPJ fisik tidak diserahkan ke IRDA	Verifikasi spj dilakukan berjenjang Penyerahan dokumen SPJ fisik ke IRDA Juklak Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan
3	Pelaksanaan Kegiatan	Pembayaran tidak sah	1.Membuat bukti pengeluaran fiktif yang ditagihkan kepada unit kerja 2. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah tanggal bukti yang sudah pernah ditagihkan ke unit kerja 3. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	1. PPTK; 2. Bendahara Pengeluaran 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) yang bersifat Kas - fictitious expenses	PA/KPA	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	1. Kurang lengkapnya bukti pembayaran 2. Tidak adanya pengesahan bukti pembayaran	Juklak Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Saat audit kotaatan melakukan sampel bukti pengeluaran	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan
4	Pertanggungjawaban kegiatan	Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	Pelaksanaan setiap kegiatan didukung dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Namun dimungkinkan dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya formalitas.	1. PA 2. PPTK 3. Penyedia	Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) yang bersifat Kas - fictitious expenses	PA/KPA	Pengujian pertanggungjawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan	1. Urusan keuangan hanya ditangani seorang pegawai/ pegawai tertentu saja dan tidak dilakukan rotasi secara berkala 2. Lembur tanpa ada Surat Perintah Tugas	1. Proses verifikasi berjenjang di PD; 2. Laporan progress pekerjaan.	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan
<b>C PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>													
5	Persiapan Pengadaan barang dan jasa	Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark-up)	Anggaran PBJ dan atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tidak dilakukan secara keahlian antara lain dengan tidak melakukan survey harga pasar dan tanpa disertai data pendukung (backup) data harga yang jelas	1. PPK 2. Tim Teknis 3. PA/KPA	Korupsi-benturan kepentingan (Conflict of Interest)	PPK PA/KPA	1. Lemahnya peran reviu berjenjang dalam penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan (fraud) penganggaran PBJ. 2. Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	Penyusunan anggaran atau HPS tidak dilakukan secara keahlian, dengan tidak melakukan survei harga pasar.	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur: a) Pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b) HPS disusun secara keahlian	2	5	21	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan
6	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Risiko pengadaan fiktif	(1) Dilakukannya manipulasi/pemalsuan dokumen atas pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian, dan/atau Surat Pesanan, antara lain: Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% namun sebenarnya pekerjaan tidak dilaksanakan. (2) Dilakukannya manipulasi/pemalsuan	1. Bendahara Pengeluaran, 2. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, 3. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang. 4. Pejabat Pembuat Komitmen 5. Pengguna Anggaran	Penyimpangan aset (Asset Misappropriation)/ kecurangan pengeluaran (pengeluaran fiktif)	PPK PA/KPA	1. Lemahnya reviu/verifikasi dalam pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ 2. kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	Tim pemeriksa dan penerima barang tidak memiliki kompetensi/ pengetahuan atas barang yang diadakan.	1. Terdapat pemisahan fungsi antara pejabat /panitia pengadaan dengan Pejabat penerima/Pemeriksa barang/Jasa; 2. Terdapat petugas gudang/penyimpan barang; 3. Barang yang diterima dan dikeluarkan/ digunakan telah diadministrasikan pengurus Barang Persediaan/Aset; 4. Terdapat kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar pembayaran, yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan kuitansi pembayaran	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan

NO	TAHAPAN PROSES	NAMA RISIKO	SKENARIO RISIKO	PIHAK TERKAIT	JENIS RISIKO KECURANGAN	PEMILIK RISIKO	URAIAN PENYEBAB	INDIKATOR/ GEJALA/ RED FLAG	PENGENDALIAN TERPASANG	NILAI RISIKO			RESPON TERHADAP RISIKO
										KEMUNGKINAN	DAMPAK	STATUS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A PERENCANAAN PENGANGGARAN</b>													
7	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	calon penyedia memberikan gratifikasi/suap dengan maksud agar dimenangkan atau ditunjuk pada proses Pengadaan Barang dan Jasa, atau Penyedia memberikan gratifikasi/suap sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sering ditunjuk/dimenangkan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, dan berharap selalu ditunjuk sebagai Penyedia mitra	1. PA/KPA 2. PPK 3. Rekanan	Korupsi (Gratifikasi)	PPK PA/KPA	Sosialisasi dan edukasi terhadap pengendalian kecurangan kepada pegawai dan rekanan belum optimal	Terdapat kelemahan dan penyimpangan pada proses Pengadaan barang dan Jasa	1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 2. SK Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2021 tentang Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Gunungkidul; 3. SK Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Petugas Sosialisasi Gratifikasi; 4. Banner tolak gratifikasi.	3	5	22	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan
<b>D PELAYANAN</b>													
8	Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Suap/gratifikasi oleh penerima layanan kepada pemberi layanan	1. Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian, pemberi layanan memberikan pelayanan sesuai dengan permasalahan penerima layanan. Menindaklanjuti hal tersebut, penerima layanan memberikan sejumlah uang/barang kepada pemberi layanan sebagai bentuk terima kasih. 2. Penerima layanan memberikan sejumlah uang/barang kepada pemberi layanan untuk mendapatkan prioritas dalam pelayanan.	1. ASN Pemerintah Daerah; 2. ASN BKPPD.	1. Penyuapan (Bribery) 2. Gratifikasi yang tidak sah (Illegal Gratuities)	Perangkat daerah	1. Kurang/ lemahnya integritas pegawai; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pencegahan kecurangan belum optimal 3. Pengelolaan WBS belum optimal	1. Pegawai memiliki preferensi terhadap objek penerima layanan 2. Pegawai bekerja tidak sesuai ketentuan	1. Memasang banner/tulisan tidak menerima gratifikasi dalam ruang pelayanan 2. Memberikan pengarahan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan untuk menolak suap/gratifikasi 3. Pedoman dan SOP Pengelolaan WBS melalui E-LAPOR	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan
9	Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Pungli terhadap penerima layanan	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian, pemberi layanan meminta sejumlah uang/barang kepada penerima layanan atas layanan yang sudah diberikan	1. ASN Pemerintah Daerah; 2. ASN BKPPD.	Korupsi-Pemerasan (economic extortion)	Perangkat Daerah	1. Kurang/ lemahnya integritas pegawai; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pencegahan kecurangan belum optimal 3. Pengelolaan WBS belum optimal	1. Pegawai memiliki preferensi terhadap objek penerima layanan 2. Pegawai bekerja tidak sesuai ketentuan	1. Memasang informasi layanan aduan 2. Memberikan pengarahan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan untuk tidak melakukan pungli 3. Pedoman dan SOP Pengelolaan WBS melalui E-LAPOR	1	5	20	Mitigasi untuk mempertahankan kemungkinan



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS DAFTAR RISIKO KECURANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	NAMA RISIKO	SKALA RISIKO	PENYEBAB RISIKO	RENCANA MITIGASI		
				URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
<b>A PERENCANAAN PENGANGGARAN</b>						
1	Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa	21	kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang	1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa; 2. Pakta Integritas para pelaku pengadaan	Semester 2 Tahun 2024	PA
<b>B PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN</b>						
2	Pengeluaran kegiatan Fiktif	20	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ	Semester 2 Tahun 2024	PA PPK
3	Pembayaran tidak sah	20	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ	Semester 2 Tahun 2024	PA PPK
4	Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	20	Pengujian pertanggungjawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan	1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang	Semester 2 Tahun 2024	PA PPK
<b>C PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						
5	Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark-up)	21	1. Lemahnya peran reuiu berjenjang dalam penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan (fraud) penganggaran PBJ. 2. Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	1. Optimasilasi peran konsultan perencana dan tim teknis dalam penyusunan HPS 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ;	Semester 2 Tahun 2024	PA PPK

NO	NAMA RISIKO	SKALA RISIKO	PENYEBAB RISIKO	RENCANA MITIGASI		
				URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
6	Risiko pengadaan fiktif	20	1. Lemahnya revid/verifikasi dalam pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ 2. kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan	1. optimalisasi peran Konsultan Pengawas dan Tim Teknis dalam proses pemeriksaan hasil pekerjaan 2. Peningkatan peran PPK dalam pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pelaksanaan Monev secara berkala	Semester 2 Tahun 2024	PA PPK
7	PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	22	Sosialisasi dan edukasi terhadap pengendalian kecurangan kepada pegawai dan rekanan belum optimal	1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah 3. Penandatanganan pakta integritas dalam rangka pengadaan barang dan jasa	Semester 2 Tahun 2024	PA PPK
<b>D PELAYANAN</b>						
8	Suap/gratifikasi oleh penerima layanan kepada pemberi layanan	20	1. Kurang/ lemahnya integritas pegawai; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pencegahan kecurangan belum optimal 3. Pengelolaan WBS belum optimal	1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah 2. Penguatan WBS di lingkungan BKPPD Kabupaten Gunungkidul 3. Penandatanganan maklumat pelayanan	Semester 2 Tahun 2024	PA
9	Pungli terhadap penerima layanan	20	1. Kurang/ lemahnya integritas pegawai; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pencegahan kecurangan belum optimal 3. Pengelolaan WBS belum optimal	1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah 2. Penguatan WBS di lingkungan BKPPD Kabupaten Gunungkidul 3. Penandatanganan maklumat pelayanan	Semester 2 Tahun 2024	PA

Gunungkidul, 9 Juli 2024  
 Plh. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
 Kabupaten Gunungkidul

  
 BENLINAWATI, S.Sos  
 NIP. 197210311996032002